



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih di Provinsi Kepulauan Riau, perlu disusun Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau.
6. Inspektur Daerah adalah Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Inspektorat Daerah Provinsi adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
9. Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota adalah Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau.
10. Kebijakan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
11. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif

dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.
13. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi serta sebagai dasar untuk menilai atau mengevaluasi kinerja pejabat fungsional auditor dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bermaksud untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mensinergikan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah dan pemerintah kabupaten/kota terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Perencanaan pengawasan yang dilakukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
 - a. pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat dilaksanakan secara terpadu.

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 meliputi:
 - a. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang disusun berbasis prioritas dan resiko;
 - b. sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - c. PKPT tahun 2022.
- (2) Fokus dan sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
- (3) PKPT tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diuraikan dalam:
 - a. pengawasan umum;
 - b. pembinaan teknis;
 - c. pengawasan teknis; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan Gubernur terhadap Perangkat Daerah;
- (2) Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Perangkat Daerah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam hal hasil pengawasan terindikasi kerugian keuangan Daerah, Perangkat Daerah melakukan proses penyelesaian kerugian Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2022.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 17 Januari 2022

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 17 Januari 2022

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



LAMIDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022 NOMOR 025

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022

I. PENGAWASAN UMUM

Fokus dan sasaran pengawasan umum dilakukan oleh perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Dalam pengawasan umum dilakukan oleh inspektorat daerah provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota.

Fokus serta sasaran pengawasan umum, sebagai berikut:

| NO | FOKUS | SASARAN PENGAWASAN |
|------|--|---|
| I. | Aspek Pembagian Urusan | |
| A. | Kesesuaian pelaksanaan urusan daerah sesuai dengan kewenangannya | Penyelesaian peralihan Personil, pembiayaan, peralatan dan dokumentasi implikasi pergeseran pelaksanaan urusan. |
| II. | Aspek Kelembagaan Daerah | |
| A. | Penyederhanaan struktur organisasi pemerintah daerah | Kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan penyederhanaan struktur organisasi. |
| | Beban kerja perangkat daerah untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar | Pemeriksaan kesesuaian beban kerja perangkat daerah untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar, dengan uji petik terkait: 1. Rasio pusat layanan kesehatan dengan jumlah penduduk; dan 2. Rasio sekolah dengan jumlah penduduk |
| III. | Kepegawaian pada Perangkat Daerah | |
| A. | Transformasi jabatan struktural ke fungsional. | Kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan transformasi jabatan struktural ke fungsional. |
| B. | Kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan konsultasi terhadap pengisian jabatan tertentu | Kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan konsultasi terhadap pengisian jabatan sekretaris daerah, inspektur daerah, inspektur pembantu daerah, dan kependudukan dan pencatatan sipil. |
| C. | Pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek manajemen aparatur sipil negara. | Kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek manajemen aparatur sipil negara melalui aplikasi <i>monitoring centre of prevention</i> . |

| IV. Keuangan Daerah | | |
|---------------------|--|--|
| A. | Penganggaran pendapatan dan belanja daerah. | kecukupan anggaran pendapatan belanja daerah untuk mendukung pendanaan fokus pembangunan nasional dan penanganan pandemi <i>covid-19</i> ; kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja yang besarnya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan termasuk anggaran pengawasan; implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di lingkungan pemerintahan daerah; dan Kepatuhan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menjalankan program penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. |
| B. | Pengelolaan pendapatan daerah. | pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya; kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah untuk belanja daerah |
| C. | Pengelolaan belanja daerah. | pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan pengelolaan belanja dalam rangka penanganan pandemicovid-19. |
| D. | Optimalisasi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. | Sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapattan dan belanja daerah; dan Pengelolaan manajemen kas. |
| E. | Pengelolaan barang milik daerah. | Pengelolaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan pemindahtanganan. |
| F. | Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. | Proses evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan |
| G. | Pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek keuangan daerah. | Kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek keuangan daerah melalui aplikasi <i>monitoring centre of prevention</i> . |

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| V. Pelayanan Publik di Daerah | | |
| A. | Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan perizinan seperti tersedianya standar operasional prosedur, penerapan <i>online single submission risk based approach</i> , kesesuaian lembaga dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; kepatuhan pemerintah daerah dalam menerapkan penyelenggaraan perizinan berbasis risiko; dan kepatuhan pemerintah daerah dalam menerapkan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah |
| B. | Pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek pelayanan publik di daerah. | Kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek pelayanan publik di daerah melalui aplikasi <i>monitoring centre of prevention</i> . |
| VI. Kerja Sama Daerah | | |
| A. | Inovasi daerah. | Pengembangan kerja sama daerah dan pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. |
| B. | Tata cara kerja sama daerah. | Kepatuhan daerah dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. |

II. PEMBINAAN TEKNIS

Fokus dan sasaran pembinaan teknis dilakukan oleh perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Dalam pembinaan teknis dilakukan oleh inspektorat daerah provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota.

Fokus serta sasaran pembinaan teknis, sebagai berikut:

| NO | FOKUS | SASARAN PEMBINAAN TEKNIS |
|----|--|---|
| I. | Pemenuhan kebutuhan dasar standar pelayanan minimal bidang pendidikan | |
| A. | Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan Standar jumlah dan | Pembinaan sumber daya manusia bidang pendidikan; dan Asistensi dan monitoring pelaporan |

| | | | |
|------|--|--|--------------------------------------|
| | kualitas pendidik dan tenaga kependidikan | capaian minimal | standar pelayanan bidang pendidikan. |
| II. | Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | | |
| A. | Penyediaan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak serta aman. | 1. sosialisasi minimal; 2. bimbingan teknis pelaporan capaian standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berbasis aplikasi; 3. sosialisasi arah dan kebijakan dana alokasi khusus tahun anggaran 2022; 4. fasilitasi pelaporan elektronik monitoring dan <i>immediate outcome</i> ; 5. pembinaan pengusulan rencana kegiatan dana alokasi khusus tahun anggaran 2022 dalam sinkronisasi-harmonisasi dan konsultasi program; dan 6. sosialisasi, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan dana alokasi khusus terintegrasi. | standar pelayanan |
| III. | Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | | |
| A. | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum yang sesuaistandar. | asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang trantibum. | |
| B. | Manajemen bencana yang terintergrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. | asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana. | |
| C. | Pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar. | asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang damkar | |
| IV. | Urusan Sosial | | |
| A. | Pemenuhan standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial oleh pemerintah daerah. | fasilitasi dan verifikasi penyediaan data penduduk miskin dan rentan miskin; dan fasilitasi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis serta korban bencana alam dan sosial. | |
| V. | Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| A. | Pelayanan administrasi kependudukan. | Peningkatan kompetensi aparatur sipil negara pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. | |
| VI. | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | |
| A. | Penataan dan administrasi pemerintahan desa. | Fasilitasi dan asistensi penataan dan administrasi pemerintahan desa. | |
| VII. | Urusan Statistik | | |

| | | |
|----|---|--|
| A. | Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan atau pembangunan nasional. | fasilitasi survei penggunaan data statistik pada organisasi perangkat daerah untuk perencanaan pembangunan daerah oleh satkerbadan pusat statistik; dan fasilitasi survei penggunaan data statistik untuk monitoring dan evaluasi. |
|----|---|--|

III. PENGAWASAN TEKNIS

Fokus dan sasaran pengawasan teknis dilakukan oleh perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Dalam pengawasan teknis dilakukan oleh inspektorat daerah provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota.

Fokus serta sasaran pengawasan teknis, sebagai berikut:

| NO | FOKUS | SASARAN PENGAWASAN |
|-----|--|---|
| I. | Pemenuhan kebutuhan dasar standar pelayanan minimal bidang pendidikan | |
| A. | Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan | Capaian pelaksanaan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan bidang pendidikan di kabupaten/kota dan provinsi Capaian pelaksanaan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan bidang pendidikan di kabupaten/kota dan provinsi. |
| B. | Pelayanan kesehatan. | pembinaan dan pengawasan pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu, pelayanan kegawat darurat di rumah sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa; pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah sakit dan pemberian sanksi administratif kepada rumah sakit pendidikan yang melanggar ketentuan; pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan; pengawasan pendanaan pendidikan kedokteran; dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program jaminan kesehatan. |
| II. | Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | |
| C. | Penyediaan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak serta aman. | Pengawasan capaian standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. |

| | | |
|---|---|---|
| III. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | | |
| A. | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum yang sesuai standar. | memenuhi standardisasi sarana pra sarana satuan polisi pamong praja; dan capaian standar pelayanan minimal subbidang ketentraman dan ketertiban umum. |
| B. | Manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. | capaian standar pelayanan minimal sub bidang bencana; dan pengembangan pra sarana dan informasi penanggulangan bencana sesuai dengan standar. |
| C. | Pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar. | memenuhi standardisasi sarana pra sarana pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan capaian standar pelayanan minimal sub bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan |
| IV. Urusan Sosial | | |
| A. | Pemenuhan standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial oleh pemerintah daerah. | Pengawasan capaian standar pelayanan minimal bidang rehabilitasi sosial. |
| V. Urusan Lingkungan Hidup | | |
| A. | Peningkatan penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan izin peraturan undang-undang lingkungan hidup yang diterbitkan. | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian izin peraturan undang-undang lingkungan hidup yang diterbitkan. |
| B. | Pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota. | pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota; pengurangan timbulan sampah; dan penanganan timbulan sampah. |
| VI. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| A. | Pelayanan administrasi kependudukan. | Kesesuaian pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| VII. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | |
| A. | Penataan dan administrasi pemerintahan desa. | pelaksanaan validasi dan klarifikasi kodefikasi dan penamaan desa; dan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa. |
| VIII. Urusan Statistik | | |
| A. | Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan atau pembangunan nasional. | Pemantauan secara berkelanjutan terhadap kegiatan penyediaan data statistik dalam perencanaan pembangunan daerah. |

IV. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN GUBERNUR TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pembinaan dan pengawasan Gubernur terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah, dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2022 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

| No | Fokus | Sasaran |
|----|---|--|
| 1. | Rancangan akhir rencanakerja pemerintah daerah. | 1) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencanakerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah. 2) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencanakerja pemerintah daerah. 3) pengujian atas kesesuaian |

| No | Fokus | Sasaran |
|----|--|--|
| | | <p>indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah</p> |
| 2. | <p>Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.</p> | <p>1) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah.</p> <p>2) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.</p> <p>3) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.</p> |
| 3. | <p>Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara</p> | <p>1) pengujian konsistensi/ keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan Gubernur tentang rencana kerja perangkat daerah.</p> <p>2) pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi:</p> <p>a) pendapatan daerah;</p> |

| No | Fokus | Sasaran |
|----|--|--|
| | | b) belanja daerah; dan c) pembiayaan daerah. |
| 4. | Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah | 1) pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggarandan priorotas plafon anggaran sementara dan peraturan Gubernur tentang rencana kerja perangkat daerah. 2) pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi: a) pendapatan daerah; b) belanja daerah; dan c) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah. |

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

| No | Fokus | Sasaran |
|----|--|---|
| 1. | Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. | a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau |

| No | Fokus | Sasaran |
|----|---|--|
| | | <p>retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasanpenyeterannya;</p> <p>b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;</p> <p>c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>d. penagihan piutang daerah.</p> |
| 2. | Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah. | <p>a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan</p> <p>b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) hibah dan bantuan sosial. 2) pengadaan barang dan jasa. 3) perjalanan dinas. |
| 3. | Pengelolaan pembiayaan daerah. | Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- |

| No | Fokus | Sasaran |
|----|---|---|
| | | undangan. |
| 4. | Pengelolaan manajemen kas dan persediaan. | <p>a. sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;</p> <p>b. pengelolaan deposito;</p> <p>c. pengelolaan persediaan; dan</p> <p>d. administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.</p> |
| 5. | Pengelolaan barang milik daerah. | <p>a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;</p> <p>b. penggunaan;</p> <p>c. pemanfaatan;</p> <p>d. pengamanan dan pemeliharaan; dan</p> <p>e. pemindahtanganan.</p> |

c. Reviu Laporan Keuangan

| No | Fokus | Sasaran |
|----|-------------------|---|
| 1. | Laporan keuangan. | <p>Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.</p> |

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

| No | Fokus | Sasaran |
|----|--|--|
| 1. | Probity audit. | Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis. |
| 2. | Laporan kinerja (reviu). | Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. |
| 3. | Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah(reviu). | Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. |
| 4. | Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu). | Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah. |
| 5. | perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (<i>responsive gender</i> (evaluasi). | Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender. |
| 6. | Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan). | a. efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota; b. pengelolaan keuangan dan aset desa; c. pengelolaan keuangan badan usaha milik desa; d. konsistensi rancangan |

| No | Fokus | Sasaran |
|----|-------|---|
| | | anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintahdesa; e. kualitas belanja desa; f. pengadaan barang dan jasa di desa; dan g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa. |

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

| No | Fokus | Sasaran |
|----|---------------------------|---|
| 1. | Pengendalian gratifikasi. | Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi: a. penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara; b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi: 1) Pre-implementasi: a) perolehan komitmen pimpinan instansi; b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit |

| No | Fokus | Sasaran |
|----|---|--|
| | | <p>pengendalian gratifikasi; dan</p> <p>d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi.</p> <p>2) Implementasi:</p> <p>a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;</p> <p>b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</p> <p>c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan</p> <p>d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.</p> <p>3) Pasca Implementasi:</p> <p>a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan</p> <p>b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.</p> |
| 2. | Pelaksanaan survei penilaian integritas | a. meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei |

| No | Fokus | Sasaran |
|----|---|---|
| | | <p>penilaian integritas; dan</p> <p>b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.</p> |
| 3. | <p>Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.</p> | <p>Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.</p> |
| 4. | <p>Asistensi pembangunan reformasi birokrasi.</p> | <p>Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:</p> <p>a. sistem pengendalian intern pemerintah;</p> <p>b. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;</p> <p>c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;</p> <p>d. penilaian internal zona integritas;</p> <p>e. penanganan benturan kepentingan;</p> <p>f. penanganan laporan pengaduan; dan</p> <p>g. penanganan pengaduan masyarakat.</p> |
| 5. | <p>Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan</p> | <p>Keterepatan waktu dan kehandalan laporan atas</p> |

| No | Fokus | Sasaran |
|----|--|--|
| | oleh strategi nasional pencegahan korupsi. | <p>pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. implementasi <i>elektronik payment</i> dan <i>elektronik catalog</i>. |
| 6. | Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi. | <p>Keterepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahandan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengadaan barang dan jasa; c. pelayanan terpadu satu pintu; d. aparat pengawas intern pemerintah; e. manajemen aparatur sipil negara; f. optimalisasi pajak daerah; g. manajemen aset daerah; dan h. tata kelola desa. |

| No | Fokus | Sasaran |
|-----|---|---|
| 7. | Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar. | Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar. |
| 8. | Pemeriksaan investigatif. | Penanganan pengaduan yang terkait: <ul style="list-style-type: none"> a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. pelanggaran disiplin pegawai. |
| 9. | Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi. | <ul style="list-style-type: none"> a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. perhitungan kerugian keuangan negara/daerah. |
| 10. | Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah. | Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya. |

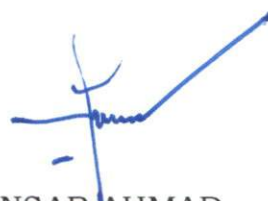
4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

| No | Fokus | Sasaran |
|----|--|---|
| 1. | Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3. | Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: |

| No | Fokus | Sasaran |
|----|--|---|
| | | a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola. |
| 2. | Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah. | <i>Quality assurance</i> kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern. |
| 3. | Penerapan manajemen risiko. | Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. b. Hasil 1) aktivitas penanganan |

| No | Fokus | Sasaran |
|----|--|--|
| | | <p>risiko; dan 2) <i>outcomes</i>.</p> |
| 4. | <p>Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.</p> | <p>Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. audit kinerja; b. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; c. penerapan manajemen risiko; d. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; e. teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah; f. audit investigasi; g. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; h. pemeriksaan dana alokasi khusus fisik; i. sertifikasi <i>certified of government chief audit executive</i>; dan j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya. |

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAR AHMAD



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Gedung C1 Lantai II dan III Pulau Dompok
Email : itprovkepri@gmail.com
TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 696 /KPTS-3/ I /2022

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022, maka perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 738);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.
- KEDUA** : Program Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Januari 2022

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



ST. IRMENDAS, SE. Ak

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19650726 199403 1 001

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

| NO | AUDITI | RISIKO | PELAKSANAAN | | SUSUNAN TIM PENGAWAS | | | | | | JUMLAH HARI | BIAYA (Rp) | OUTPUT | UNIT YANG MELAKSANAKAN | |
|------------|---|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|--------|-----------|-------------|--------|-------------|---------------|--------|---------------------------|--|
| | | | MULAI | SELESAI | PJ | PEMBANTU PJ | DALNIS | KETUA TIM | ANGGOTA TIM | JUMLAH | | | | | |
| I | AUDIT KETAATAN PADA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PERANGKAT DAERAH A | Tinggi | Minggu IV Februari | Minggu II Maret | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 16 | | 1 LHP | IRBAN III | |
| 2 | PERANGKAT DAERAH B | Tinggi | Minggu IV Februari | Minggu II Maret | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 16 | | 1 LHP | IRBAN III | |
| 3 | PERANGKAT DAERAH C | Tinggi | Minggu IV Februari | Minggu II Maret | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | | 1 LHP | IRBAN III | |
| 4 | PERANGKAT DAERAH BP2RD | Tinggi | Minggu IV Februari | Minggu II Maret | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | | 1 LHP | IRBAN III | |
| II | AUDIT KINERJA PADA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PERANGKAT DAERAH A | Prioritas Utama | Minggu II Mei | Minggu IV Mei | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | | 1 LHP | IRBAN II | |
| 2 | PERANGKAT DAERAH B | Prioritas Utama | Minggu II Mei | Minggu IV Mei | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | | 1 LHP | IRBAN II | |
| 3 | PERANGKAT DAERAH C | Prioritas Utama | Minggu IV Juli | Minggu II Agustus | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | | 1 LHP | IRBAN II | |
| 4 | PERANGKAT DAERAH D | Tinggi | Minggu IV Juli | Minggu II Agustus | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | | 1 LHP | IRBAN II | |
| 5 | PERANGKAT DAERAH E | Tinggi | Minggu III Oktober | Minggu IV Oktober | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | | 1 LHP | IRBAN II | |
| 6 | PERANGKAT DAERAH F | Tinggi | Minggu III Oktober | Minggu IV Oktober | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | | 1 LHP | IRBAN II | |
| III | PEMERIKSAAN CASH DAN STOCK OPNAME PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cash dan Stock Opname Perangkat Daerah | - | Minggu I Januari | Minggu III Januari | 1 | 4 | 9 | 9 | 30 | 53 | 15 | | 41 LHP | IRBAN | |
| IV | PEMERIKSAAN KHUSUS/ JOINT AUDIT/ AUDIT ON CALL | | | | | | | | | | | | | | |
| A | Revisi Tunda Bayar Tahun 2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pekerjaan pada Wilayah Kota Batam | - | Minggu I Februari | Minggu II Februari | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | | 1 LHP | IRBAN IV | |
| 2 | Pekerjaan pada Wilayah Kabupaten Bintan | - | Minggu I Februari | Minggu II Februari | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | | 1 LHP | IRBAN IV | |
| 3 | Pekerjaan pada Wilayah Kabupaten Natuna | - | Minggu I Februari | Minggu II Februari | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | | 1 LHP | IRBAN IV | |

| NO | AUDITI | RISIKO | PELAKSANAAN | | SUSUNAN TIM PENGAWAS | | | | | | JUMLAH HARI | BIAYA (Rp) | OUTPUT | UNIT YANG MELAKSANAKAN |
|----------|--|--------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------|-----------|-------------|--------|-------------|------------|--------|------------------------|
| | | | MULAI | SELESAI | PJ | PEMBANTU PJ | DALNIS | KETUA TIM | ANGGOTA TIM | JUMLAH | | | | |
| 4 | Pekerjaan pada Wilayah Kota Tanjungpinang | - | Minggu I Februari | Minggu II Februari | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | | 1 LHP | IRBAN IV |
| B | Pemeriksaan Khusus Pengaduan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengaduan A (Luar Kota) | - | Minggu II Februari | Minggu III Februari | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | | 1 LHP | IRBAN |
| 2 | Pengaduan B (Luar Kota) | - | Minggu II Februari | Minggu III Februari | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | | 1 LHP | IRBAN |
| 3 | Pengaduan C | - | Minggu II Februari | Minggu III Februari | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | | 1 LHP | IRBAN |
| 4 | Pengaduan D | - | Minggu II Februari | Minggu III Februari | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | | 1 LHP | IRBAN |
| 5 | Pengaduan E | - | Minggu II Februari | Minggu III Februari | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | | 1 LHP | IRBAN |
| C | Audit Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ATT pada Wilayah Natuna | - | Minggu II Maret | Minggu III Maret | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | | 1 LHP | IRBAN |
| 2 | ATT pada Wilayah Anambas | - | Minggu II Maret | Minggu III Maret | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | | 1 LHP | IRBAN |
| 3 | ATT pada Wilayah Karimun | - | Minggu II Maret | Minggu III Maret | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | | 1 LHP | IRBAN |
| 4 | ATT pada Wilayah Kota Tanjungpinang | - | Minggu II Maret | Minggu III Maret | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | | 1 LHP | IRBAN |
| D | PROBITY AUDIT | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Probit Audit pada Wilayah Tanjungpinang | | Minggu I Maret | Minggu III Maret | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | 15 | | 1 LHP | IRBAN |
| 2 | Probit Audit pada Wilayah Batam | | Minggu I Maret | Minggu II Maret | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | | 1 LHP | IRBAN |
| 3 | Probit Audit pada Wilayah Natuna | | Minggu I Maret | Minggu II Maret | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | | 1 LHP | IRBAN |
| 4 | Probit Audit pada Wilayah Karimun | | Minggu I Maret | Minggu II Maret | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | | 1 LHP | IRBAN |
| 5 | Probit Audit pada Wilayah Lingga | | Minggu I Maret | Minggu II Maret | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | | 1 LHP | IRBAN |
| V | PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kota Tanjungpinang | | Minggu II Mei | Minggu III Mei | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | | 1 LHP | IRBAN |
| 2 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kabupaten Karimun | | Minggu II Mei | Minggu III Mei | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | | 1 LHP | IRBAN |
| 3 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kabupaten Lingga | | Minggu II Mei | Minggu III Mei | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | | 1 LHP | IRBAN |

| NO | AUDITI | RISIKO | PELAKSANAAN | | SUBUNAN TIM PENGAWAS | | | | | | JUMLAH HARI | BIAYA (Rp) | OUTPUT | UNIT YANG MELAKSANAKAN |
|-----------|--|--------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------|-----------|-------------|--------|-------------|----------------------|--------|------------------------|
| | | | MULAI | SELESAI | PJ | PEMBANTU PJ | DALNIS | KETUA TIM | ANGGOTA TIM | JUMLAH | | | | |
| 4 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kabupaten Natuna | | Minggu II Mei | Minggu III Mei | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | | 1 LHP | IRBAN |
| VI | KEGIATAN REVIU | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Reviu Laporan Keuangan Daerah | - | Minggu III Februari | Minggu I Maret | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 15 | 15 | | 1 LHR | IRBAN |
| 2 | Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | - | Minggu I Maret | Minggu II Maret | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | | 1 LHR | IRBAN |
| 3 | Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau | - | Minggu II Maret | Minggu IV Maret | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | | 1 LHR | IRBAN |
| | Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran APBD 2020 | - | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Reviu RKPDP Provinsi Kepulauan Riau TA 2023 | | Minggu II Mei | Minggu III Mei | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | | 1 LHR | IRBAN |
| 5 | Reviu Renja Perangkat Daerah TA 2023 | | Minggu I Juli | Minggu III Juli | 1 | 4 | 5 | 5 | 20 | 34 | 15 | | 31 LHR | IRBAN |
| 6 | Reviu KUA PPAS Provinsi Kepulauan Riau TA 2023 | | Minggu II Mei | Minggu IV Mei | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | | 1 LHR | IRBAN |
| 7 | Reviu RKA Perangkat Daerah TA 2023 | | Minggu I Agustus | Minggu III Agustus | 1 | 4 | 6 | 6 | 24 | 41 | 15 | | 31 LHR | IRBAN |
| | Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran APBD P-2022 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Reviu RKPDP Perubahan Provinsi Kepulauan Riau TA 2022 | | Minggu III Juni | Minggu IV Juni | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | | 1 LHR | IRBAN |
| 9 | Reviu Renja Perubahan Perangkat Daerah TA 2022 | | Minggu I September | Minggu III September | 1 | 4 | 4 | 4 | 15 | 28 | 15 | | 31 LHR | IRBAN |
| 10 | Reviu KUPA PPAS Provinsi Kepulauan Riau TA 2022 | | Minggu III Agustus | Minggu IV Agustus | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | | 1 LHR | IRBAN |
| 11 | Reviu RKA Perubahan Perangkat Daerah TA 2022 | | Minggu I Oktober | Minggu III Oktober | 1 | 4 | 6 | 6 | 24 | 40 | 15 | | 31 LHR | IRBAN |
| 12 | Reviu Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tahap 1 | | Minggu I Juni | Minggu II Juni | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | | 12 LHR | IRBAN |
| 13 | Reviu Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tahap 2 | | Minggu III Juni | Minggu IV Juni | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 | 10 | | 18 LHR | IRBAN |
| 14 | Reviu Harga Perkiraan Sendiri | | Minggu II Februari | Minggu III Februari | 1 | 4 | 5 | 5 | 15 | 29 | 10 | | 10 LHR | IRBAN |
| | Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Reviu DAK Tahun Lalu | | Minggu I Februari | Minggu I Februari | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | 25 | 7 | Dibiayai OPD Terkait | 4 LHR | IRBAN |
| 16 | Reviu Kontrak DAK Tahap 1 Tahun Berjalan | | Minggu I Juli | Minggu I Juli | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | 25 | 7 | Dibiayai OPD Terkait | 4 LHR | IRBAN |
| 17 | Reviu Kontrak DAK Tahap 2 Tahun Berjalan | | Minggu IV Oktober | Minggu IV Oktober | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | 25 | 7 | Dibiayai OPD Terkait | 4 LHR | IRBAN |
| 18 | Reviu Kontrak DAK Tahap 3 Tahun Berjalan | | Minggu I Desember | Minggu I Desember | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | 25 | 7 | Dibiayai OPD Terkait | 4 LHR | IRBAN |

| NO | AUDITI | RISIKO | PELAKSANAAN | | SUBUNAN TIM PENGAWAS | | | | | | JUMLAH HARI | BIAYA (Rp) | OUTPUT | UNIT YANG MELAKSANAKAN | |
|-----------|---|--------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------|-----------|-------------|--------|-------------|------------|--------|------------------------|--|
| | | | MULAI | SELESAI | PJ | PEMBANTU PJ | DALNIS | KETUA TIM | ANGGOTA TIM | JUMLAH | | | | | |
| | Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Monev Dana BOS Pada Kabupaten Anambas | - | Minggu IV September | Minggu IV September | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | | 1 LHM | IRBAN | |
| 11 | Monev Dana BOS Pada Kabupaten Lingga | - | Minggu IV September | Minggu IV September | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | | 1 LHM | IRBAN | |
| 12 | Monev Dana BOS Pada Kabupaten Bintan | - | Minggu IV September | Minggu IV September | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | | 1 LHM | IRBAN | |
| 13 | Monev Zona Integritas | | Minggu I September | Minggu II September | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 21 | 10 | | 4 LHM | IRBAN | |
| 14 | Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Kerugian Daerah tahap I | - | Minggu III Juni | Minggu IV Juni | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | | 1 LHM | IRBAN | |
| 15 | Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Kerugian Daerah tahap II | - | Minggu III Agustus | Minggu IV Agustus | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | | 1 LHM | IRBAN | |
| 16 | Monitoring dan Evaluasi TLHP APIP dan BPK Pada Perangkat Daerah Tahap I | - | Minggu I April | Minggu II April | | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | 10 | | 1 LHM | SEKRETARIAT DAN IRBAN | |
| 17 | Monitoring dan Evaluasi TLHP APIP dan BPK Pada Perangkat Daerah Tahap II | - | Minggu I Oktober | Minggu II Oktober | | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | 10 | | 1 LHM | SEKRETARIAT DAN IRBAN | |
| 18 | Monitoring dan Evaluasi TLHP APIP dan BPK Pada Perangkat Daerah Tahap III | - | Minggu II Desember | Minggu II Desember | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | 10 | | 1 LHM | SEKRETARIAT DAN IRBAN | |
| 19 | Monitoring dan Evaluasi TLHP APIP pada Kab. Natuna | | Minggu II Mei | Minggu II Mei | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | | 1 LHM | SEKRETARIAT DAN IRBAN | |
| 20 | Monitoring dan Evaluasi TLHP APIP pada Kota Batam | | Minggu I Juni | Minggu I Juni | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | | 1 LHM | SEKRETARIAT DAN IRBAN | |
| 21 | Monitoring dan Evaluasi TLHP APIP pada Kab Bintan | | Minggu I Agustus | Minggu I Agustus | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | | 1 LHM | SEKRETARIAT DAN IRBAN | |
| IX | KEGIATAN ASISTENSI DAN KONSULTASI | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Asistensi Penyusunan Register Risiko Perangkat Daerah pada Seluruh Perangkat Daerah | - | Minggu III Maret | Minggu III Maret | 1 | 4 | 6 | 6 | 24 | 40 | 3 | | 1 LAP | IRBAN | |
| 2 | Asistensi Kematangan MR Perangkat Daerah Tahap I | - | Minggu III Juni | Minggu IV Juni | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 10 | | 1 LAP | IRBAN | |
| 3 | Asistensi Kematangan MR Perangkat Daerah Tahap I | - | Minggu III Juli | Minggu IV Juli | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 10 | | 1 LAP | IRBAN | |
| 4 | Pemetaan Level Kematangan MR Pada Perangkat Daerah | | Minggu I April | Minggu III April | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | 15 | | 1 LAP | IRBAN | |
| X | KEGIATAN PENUNJANG PENGAWASAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan Kompetensi APIP | - | Januari | Desember | | | | | | | | | 1 LAP | SEKRETARIAT | |

| NO | AUDITI | RISIKO | PELAKSANAAN | | SUBUNAN TIM PENGAWAS | | | | | | JUMLAH HARI | BIAYA (Rp) | OUTPUT | UNIT YANG MELAKSANAKAN |
|----|---|--------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------|-----------|-------------|--------|-------------|---------------|--------|---------------------------|
| | | | MULAI | SELESAI | PJ | PEMBANTU PJ | DALNIS | KETUA TIM | ANGGOTA TIM | JUMLAH | | | | |
| 2 | Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (RAKORWASDA) Tingkat Provinsi Kepulauan Riau. | - | Minggu II September | Minggu II September | | | | | | | | | 1 LAP | SEKRETARIAT |
| 3 | Aksi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau | - | Januari | Desember | | | | | | | | | 1 LAP | SEKRETARIAT |

a.n.GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



ST. IRMENDAS, S.E. Ak.

NIP. 19650726 199403 1 001